

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar telah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tahun 2024 sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang SOTK, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan P RENJA PD ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan P RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2024.

Semoga penyusunan P RENJA ini bermanfaat bagi pembangunan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kota Blitar.

Blitar, Agustus 2024
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Blitar



Drs. HAKIM SISWORO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690908 198809 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum..... 2

 1.3. Maksud dan tujuan 3

 1.4. Sistematika Penyusunan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 9

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian
 Renstra PD 9

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 23

 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
 Fungsi PD..... 27

 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 29

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 38

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 43

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 43

 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD..... 45

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD..... 47

BAB V. PENUTUP 55

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian RENSTRA PD s/d Tahun 2018 Kota Blitar	7
2. Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar	21
3. Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kota Blitar	27
4. Tabel 2.4	Usulan Program & Kegiatan dari Masyarakat & Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kota Blitar	42
5. Tabel 3.1	Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja PD Tahun 2019	47
6. Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kota Blitar	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2024.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
 17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023 dan DAK TA 2023;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No. 1 Seri E);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;
34. Peraturan Walikota Blitar No. 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023; dan
35. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
36. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar;
37. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor XX);
38. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 nomor XX).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dimaksudkan sebagai pedoman dan arah bagi Disperindag Kota Blitar dalam melaksanakan perubahan terhadap

program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

- Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Disperindag sampai dengan triwulan dua tahun 2024 ;
- Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
- Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024 dengan dokumen Perubahan Renja Disperindag Kota Blitar Tahun 2024
- Sebagai pedoman penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2024 dan PAPBD Kota Blitar Tahun 2024

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
	A. Latar Belakang
	B. Dasar Hukum
	C. Maksud dan Tujuan
	D. Sistematika
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 sampai dengan Tribulan II
BAB III	Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024.
BAB IV	Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Disperindag Kota Blitar Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Pada awal Tahun Anggaran 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 2 urusan pilihan pemerintahan, dengan 5 program, 13 kegiatan serta 30 Sub Kegiatan, dengan anggaran Belanja Rp. 17.303.444.697,- namun pada bulan Mei 2024, dilakukan pergeseran uraian kegiatan dan tidak merubah pagu Anggaran dan juga untuk penyesuaian gaji dan tunjangan ASN, dengan anggaran belanja tetap Rp. 17.303.444.697,- dari Pagu anggaran tersebut capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 6.587.291.632,- atau 38,06 %. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II sangat rendah dikarenakan :

1. beberapa kegiatan fisik yang bersifat kontraktual masih dalam proses pelaksanaan
2. dan RAK disusun pada bulan Juli 2024

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		10 = 8+9		11 = 6 +10		12= 11/5 x 100 %		(13)
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	82	41.891.252.880,00	0.00	0,00	81	7.100.687.445,00	84,01	1.422.913.587,00	0,00	2.564.238.672,00	84,01	3.987.152.259,00	84.01	3.987.152.259,00	102,45	9.52	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	persen	100	48.671.500,00	0.00	0,00	100	9.734.300,00	40,00	0,00	20,00	4.439.500,00	60,00	4.439.500,00	60,00	4.439.500,00	0,00	9,12	

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		3.003.600,00	0.00	0,00	10	3.003.600,00	4,00	0,00	2,00	1.267.500,00	6,00	1.267.500,00	6,00	1.267.500,00	0,00	42,20	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			0.00	0,00	8	6.730.700,00	3,00	0,00	2,00	3.172.000,00	5,00	3.172.000,00	5,00	3.172.000,00	0,00	47,13	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			61,25	44,67	
Predikat kinerja(%)																			Rendah	Sangat Rendah	

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	persen		28.606.946.700,00	0.00	0,00	100	5.721.389.340,00	25,00	1.096.472.101,00	24,99	2.252.677.610,00	49,99	3.349.149.711,00	49,99	3.349.149.711,00	0,00	11,71	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		5.716.031.240,00	0.00	0,00	57	5.716.031.240,00	228,00	1.096.472.101,00	285,00	2.252.677.610,00	513,00	3.349.149.711,00	513,00	3.349.149.711,00	0,00	58,59	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			0.00	0,00	12	5.358.100,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	

Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		470,84	29,30		
Predikat kinerja(%)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	persen		881.196.100,00	0.00	0,00	100	176.239.220,00	25,00	45.935.000,00	24,99	59.140.000,00	49,99	105.075.000,00	49,99	105.075.000,00	0,00	11,92	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		76.950.000,00	0.00	0,00	4	76.950.000,00	2,00	42.465.000,00	1,00	0,00	3,00	42.465.000,00	3,00	42.465.000,00	0,00	55,19	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			0.00	0,00	350	99.289.220,00	20,00	3.470.000,00	195,00	59.140.000,00	215,00	62.610.000,00	215,00	62.610.000,00	0,00	63,06	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		68,22	59,13		
Predikat kinerja(%)																		Sedang	Rendah		

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	persen		2.358.893.000,00	0.00	0,00	100	471.778.600,00	25,00	115.828.055,00	24,99	62.745.536,00	49,99	178.573.591,00	49,99	178.573.591,00	0,00	7,57	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		20.197.000,00	0.00	0,00	1	20.197.000,00	0,24	5.189.700,00	0,25	8.457.300,00	0,49	13.647.000,00	0,49	13.647.000,00	0,00	67,57	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			0.00	0,00	4	74.308.000,00	2,00	31.539.100,00	0,00	0,00	2,00	31.539.100,00	2,00	31.539.100,00	0,00	42,44	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			0.00	0,00	1	7.577.600,00	0,33	1.903.500,00	0,08	2.052.900,00	0,41	3.956.400,00	0,41	3.956.400,00	0,00	52,21	

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0.00	0,00	15	73.987.000,00	3,75	13.342.000,00	4,25	14.365.000,00	8,00	27.707.000,00	8,00	27.707.000,00	0,00	37,45	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			0.00	0,00	4	45.350.000,00	0,16	21.382.500,00	2,84	0,00	3,00	21.382.500,00	3,00	21.382.500,00	0,00	47,15	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			0.00	0,00	36	6.840.000,00	9,00	1.350.000,00	9,00	0,00	18,00	1.350.000,00	18,00	1.350.000,00	0,00	19,74	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			0.00	0,00	15	243.519.000,00	3,00	41.121.250,00	6,00	37.870.360,00	9,00	78.991.591,00	9,00	78.991.591,00	0,00	32,44	

Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			54,05	42,71	
Predikat kinerja(%)																			Rendah	Sangat Rendah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	persen		2.203.287.645,00	0.00	0,00	100	440.657.529,00	25,00	103.096.222,00	24,99	138.662.403,00	49,99	241.758.625,00	49,99	241.758.625,00	0,00	10,97	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		205.864.929,00	0.00	0,00	24	205.864.929,00	6,00	62.221.290,00	6,00	55.439.979,00	12,00	117.661.269,00	12,00	117.661.269,00	0,00	57,15	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			0.00	0,00	24	234.792.600,00	6,00	40.874.932,00	6,00	83.222.424,00	12,00	124.097.356,00	12,00	124.097.356,00	0,00	52,85	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			50,00	55,00	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Rendah	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMN yang terpelihara sesuai standar	persen		1.404.442. 280,00	0.0 0	0,00	100	280.888.456,0 0	0,00	61. 582 .20 9,0 0	58, 33	46.573. 623,00	58,33	108.155 .832,00	5 8, 3 3	108.155.832 ,00	0,00	7,70	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	Unit		180.379.4 56,00	0.0 0	0,00	17	180.379.456,0 0	4,00	57. 041 .70 9,0 0	4,00	34.846. 629,00	8,00	91.888. 338,00	8, 0 0	91.888.338, 00	0,00	50,94	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			0.0 0	0,00	10	25.509.000,00	3,00	4.5 40. 500 ,00	3,00	5.864.0 00,00	6,00	10.404. 500,00	6, 0 0	10.404.500, 00	0,00	40,79	
		Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	Unit			0.0 0	0,00	1	75.000.000,00	0,25	0,0 0	0,25	5.862.9 94,00	0,50	5.862.9 94,00	0, 5 0	5.862.994,0 0	0,00	7,82	

Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		52,35	33,18		
Predikat kinerja(%)																		Rendah	Sangat rendah		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		53,05	49,16		
Predikat kinerja(%)																		Rendah	294.98/6		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan anggaran Kesesuaian dengan waktu penjadwalan dan pelaksanaannya																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : aplikasi pengajuan realisasi anggaran kurang menunjang																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan melaksanakannya sesuai jadwal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																					
2			persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	persen	6.0	82.934.193.650,00	0.00	0,00	72	5.549.449.600,00	72,00	907.067.684,00	0,00	1.772.129.248,00	72,00	2.679.196.932,00	72	2.679.196.932,00	1.200,00	3.23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase bangunan pasar rakyat dalam kondisi baik	persen		23.883.732.000,00	0.00	0,00	80	4.776.746.400,00	100,00	662.057.284,00	40,00	1.449.675.248,00	50,00	2.111.732.532,00	50,00	2.111.732.532,00	0,00	8,84	
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		1.263.425.400,00	0.00	0,00	2	1.263.425.400,00	100,00	148.206.710,00	0,25	419.813.668,00	1,25	568.020.378,00	1,25	568.020.378,00	0,00	44,96	
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan	Unit			0.00	0,00	11	3.513.321.000,00	500,00	513.850.574,00	3,00	1.029.861.580,00	8,00	1.543.712.154,00	8,00	1.543.712.154,00	0,00	43,94	

			Sarana Distribusi Perdagangan																	
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			67,62	44,45	
Predikat kinerja(%)																			Sedang	Sangat Rendah	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	persen		3.863.516.000,00	0.00	0,00	6	772.703.200,00	3,00	245.010.400,00	2,00	322.454.000,00	5,00	567.464.400,00	5,00	567.464.400,00	14,69		
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen		494.258.900,00	0.00	0,00	5	494.258.900,00	1,00	8.600.400,00	2,00	115.524.000,00	3,00	124.124.400,00	3,00	124.124.400,00	25,11		
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen			0.00	0,00	4	278.444.300,00	2,00	236.410.000,00	1,00	206.930.000,00	3,00	443.340.000,00	3,00	443.340.000,00	159,22		

Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		67,50	92,17		
Predikat kinerja(%)																		Sedang	Sangat tinggi		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		72,92	58,83		
Predikat kinerja(%)																		Sedang	117.65/2		
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Pemilihan penyedia yang memiliki pengalaman dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dapat mempercepat proses pengadaan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																					
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : segera berkoordinasi dengan pihak=pihak terkait dan segera melaksanakan kegiatan sesuai jadwal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																					
3		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	persen	100	1.299.777.700,00	0.00	0,00	100	194.267.400,00	20,00	77.865.000,00	60,00	12.328.000,00	80,00	90.193.000,00	80	90.193.000,00	80,00	6.94	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	persentase ketersediaan barang penting yang diawasi	persen		462.193.000,00	0.00	0,00	100	92.438.600,00	50,00	74.301.000,00	10,00	0,00	60,00	74.301.000,00	60,00	74.301.000,00	0,00	16,08	

		di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan		92.438.600,00	0.00	0,00	2	92.438.600,00	1,00	74.301,00	0,00	0,00	1,00	74.301.000,00	1,00	74.301.000,00	0,00	80,38	

Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			50,00	80,38	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Tinggi	
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	persen		388.644.000,00	0.00	0,00	100	77.728.800,00	25,00	3.564.000,00	25,00	12.328.000,00	50,00	15.892.000,00	50,00	15.892.000,00	0,00	4,09	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam	Laporan		77.728.800,00	0.00	0,00	4	77.728.800,00	1,00	3.564.000,00	2,00	12.328.000,00	3,00	15.892.000,00	3,00	15.892.000,00	0,00	20,45	

			1 (Satu) Kabupaten/Ko ta																	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		75,00	20,45	
Predikat kinerja(%)																		Sedang	Sanga t Renda h	

		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	persen		120.500.0 00,00	0.00	0,00	100	24.100.000,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	
		Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan		24.100.00 0,00	0.00	0,00	2	24.100.000,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0,00	0,00	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sanga t Renda h	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		36,67	33,61	

Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	100.83/3	
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : adanya operasi pasar																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																					
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																					
4		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase alat UTTP bertanda terasah	persen	55	9.334.115.025,00	0.00	0,00	45	182.109.938,00	1,80	36.850.000,00	15,57	41.371.900,00	17,37	78.221.900,00	17,37	78.221.900,00	31,58	0.84	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda terasah	unit		910.549.690,00	0.00	0,00	5800	182.109.938,00	99,00	36.850.000,00	856,00	41.371.900,00	955,00	78.221.900,00	955,00	78.221.900,00	0,00	8,59	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit		86.467.038,00	0.00	0,00	5500	86.467.038,00	99,00	13.250.000,00	856,00	20.540.000,00	955,00	33.790.000,00	955,00	33.790.000,00	0,00	39,08	

		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang			0.00	0,00	160	95.642.900,00	34,00	23.600.000,00	81,00	20.831.900,00	115,00	44.431.900,00	115,00	44.431.900,00	0,00	46,46	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			44,62	42,77	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			16,47	42,95	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	42.95 /1	

5		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase peningkatan IKM	persen	6	11.526.834.030,00	0.00	0,00	3.5	2.820.071.493,00	1,00	11.752.000,00	1,50	845.189.949,00	2,50	856.941.949,00	2.5	856.941.949,00	41,67	7.43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana	persentase IKM yang	persen		14.100.357.465,00	0.00	0,00	5	2.820.071.493,00	1,00	11.752.000,00	2,00	845.189.949,00	3,00	856.941.949,00	3,00	856.941.949,00	0,00	6,08	

		Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	memperoleh pembinaan								0,00									
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen		115.252.175,00	0,00	0,00	3	115.252.175,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen			0,00	0,00	5	2.567.127.748,00	0,20	11.752.000,00	3,80	841.068.949,00	4,00	852.820.949,00	4,00	852.820.949,00	0,00	33,22

		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen			0,00	0,00	3	137.691.570,00	1,00	0,00	1,00	4.121.000,00	2,00	4.121.000,00	2,00	4.121.000,00	0,00	2,99
--	--	--	--	---------	--	--	------	------	---	----------------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	------

Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			60,00	12,07	
Predikat kinerja(%)			Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			60,00	30,39	
Predikat kinerja(%)			Rendah	30.39 /1	
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	78,75	44,84			
Predikat kinerja(%)	Tinggi	Sangat Rendah			
Total	15.846.585.876,00			7.691.706.040,00	
Persentase Realisasi Anggaran	48.54%				
Predikat	Sangat Rendah				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahu 2024

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Traget Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Tujuan : Meningkatnya Tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	A (85,02)	A (85,02)
	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi	A (85,02)	A (85,02)

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Traget Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
			penggunaan anggaran APBD Nilai A pada range >80-90		
2	Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector perdagangan dan perindustrian	Kontribusi sector perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	Laju pertumbuhan ekonomi ini merupakan ukuran turunan dari PDRB. Adapun PDRB merupakan agregat atau total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut dalam satu kurun waktu tertentu. Besaran PDRB mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya	24,8	24,8
	Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	Volume Usaha Perdagangan adalah total nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa pada suatu periode tahun buku yang bersangkutan dan nantinya akan mendatangkan suatu pendapatan	2,25 %	2,25 %
		Kontribusi sector perindustrian terhadap PDRB		9,83	9,83
	Sasaran : Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	Produktivitas adalah produksi dari sejumlah komoditi dan jasa yang benar-benar dihasilkan dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan industri itu sendiri dalam kurun waktu tertentu	1,5	1,5

3.2 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 juga memfokuskan pada rencana tindak lanjut atas Langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Tahun 2024 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, untuk pasar ayam mengoptimalkan bangunan yang ada dan untuk tahun 2025 bisa dianggarkan revitalisasi	a. melaksanakan pemeliharaan pada semua pasar rakyat b. Tahun depan perlu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan menganggarkan pembangunan pasar ayam.	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan
2	Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait	Melaksanakan pembinaan dan menata PKL dengan lebih baik lagi sesuai dengan perwali yang ada dan tetap berkoordinasi dengan OPD tang terkait	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya - Sub Kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
3	Perlu adanya pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang di Tahun 2024 direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sector dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM	Melaksanakan pembentukan Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat -
4	Pada Tahun 2024 akan dilakukan pembahasan Raperda RPIK	Melaksanakan sesuai jadwal dan berkoordinasi dengan OPD terkait	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
5	Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI	Mempersiapkan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan bagi industri yang mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
6	Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi	Melakukan pengembangan database IKM dan kelengkapan informasinya	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
			pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat

3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Mengalami Perubahan

Program yang diusulkan untuk dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2024 terdiri dari 5 program, 13 kegiatan, dan 30 sub kegiatan. Selanjutnya, program, kegiatan dan sub kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Mengalami Perubahan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	Indeks	81	84.01	7.100.687.445,00	7.100.687.445,00	
601.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	%	100	100	9.734.300,00	9.734.300,00	
601.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	3.003.600.00	6,357,700.00	

601.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	8	6.730.700.00	6.730.700.00	
601.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	100	5.721.389.340.00	5.721.389.340.00	-
601.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	57	57	5.729.221240.00	5.729.221240.00	Penyesuaian karena ada pegawai yang purna dan mutasi
601.01.2.02.000 7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	laporan	12	12	5.358.100.00	5.358.100.00	
601.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	100	167.689.22000	167.689.22000	
601.01.2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	4	68.400.000.00	68.400.000.00	

601.01.2.05.001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	350	350	99.289.220.00	99.289.220.00	
601.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	100	470.338.600.00	470.338.600.00	
601.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	20.197.000.00	20.197.000.00	
601.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	74.308.000.00	74.308.000.00	
601.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	7.577.600.00	7.577.600.00	
601.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	15	73.987.000.00	73.987.000.00	
601.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	45.350.000.00	45.350.000.00	
601.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	36	5.400,000.00	5.400,000.00	

601.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	15	243.519.000.00	243.519.000.00	1. Penambahan kegiatan untuk pendampingan OPD dalam rangka memenuhi panggilan dari APH 2. Meningkatkan volume kegiatan yang diadakan oleh KPK
601.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100	100	440.657.529.00	440.657.529.00	
601.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	24	205.864.929.00	205.864.929.00	
601.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	24	234.792.600.00	234.792.600.00	Seragam untuk THL belum teranggarkan pada DPA Murni
601.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100	100	280.888.456.00	280.888.456.00	

601.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	17	189.311.094.00	189.311.094.00	Penambahan belanja BBM
601.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	25.509.000.00	25.509.000.00	
601.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	75.000.000.00	75.000.000.00	Pemeliharaan ruang kerja pejabat eselon II
601.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	%	72	72	6.974.099.800.00	6.974.099.800.00	
		Persentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	%	80	80	6.204.596.600	6.204.596.600	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	2	2	2.727.765.800	2.727.765.800	
	Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	unit	11	11	3.476.830.800	3.476.830.800	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	%	6	6	769.503.200	769.503.200	

	Masyarakat di Wilayah Kerjanya							
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	5	5	491.059.900.00	491.059.900.00	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	4	4	278.444.300.00	278.444.300.00	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	%	100	100	197.267.400.00	197.267.400.00	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase barang penting yang diawasi	%	100	100	92.438.600.00	92.438.600.00	
601.02.2.01.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	2	2	92.438.600.00	92.438.600.00	
601.02.2.01.000 2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	persen	100	100	77.728.800.00	77.728.800.00	

601.02.2.01.000 3	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	4	4	77.728.800.00	77.728.800.00	
601.02.2.01.000 4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	persentase	100	100	24.100.000.00	24.100.000.00	
601.02.2.01.000 6	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	laporan	2	3	24.100.000.00	24.100.000.00	Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat
601.02.2.01.000 7	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	persentase	45	45	173.160.400.00	173.160.400.00	Penambahan belanja makanan dan minuman rapat
601.02.2.02	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	unit	5800	5800	173.160.400.00	173.160.400.00	
601.02.2.02.000 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit	5500	5500	77.517.500.00	77.517.500.00	

601.02.2.02.000 2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	orang	160	160	95.642.900.00	95.642.900.00	Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat
601.03	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase peningkatan IKM	%	3,5	3,5	3.120.071.493.00	3.120.071.493.00	
		Persentase IKM yang memperoleh pembinaan	persentase	5	5	3.120.071.493.00	3.120.071.493.00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	dokumen	3	3	115.252.175.00	115.252.175.00	
601.03.2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	5	5	2.867.327.748.00	2.867.327.748.00	
601.03.2.01.000 1	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	dokumen	3	3	137.691.570.00	137.691.570.00	
Jumlah						17.555.296.538.00	17.555.296.538.00	

- 3.4 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
- Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025, disajikan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Perio de RPJM D	Realis asi Capai an RKPD Tahun 2022	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokas i	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pag u Indi katif		
										Sem ula	Men jadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perub ahan			Nasio nal					Daera h
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan																	
3					Urusan Pemerintahan Pilihan																	
3	30				Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																	
3	30	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81%		81%	81%	81%	7.051.42 1.045	7.100.68 7.445						81%		disperindag	
3	30	01	2.01		Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%		100%	100%	100%	9.734.30 0	9.734.30 0	9.734.30 0		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemuliha n ekonomi kerakyat anmelalu i peningka tan nilai tambah sektor sekunde r dan pariwisat a pemuliha n ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperind ag Kota Blitar	100%		

3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumdokumen perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen		10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	3.003.600	3.003.600	3.003.600	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihannya ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN dispendag Kota Blitar	10 dokumen	3.325.051	
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	8 laporan		8 laporan	8 laporan	8 laporan	6.730.700	6.730.700	6.730.700	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihannya ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN dispendag Kota Blitar	8 laporan	7.448.820	
3	30	01	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100%		100%	100%	100%	5.721.389.340	5.721.389.340	5.721.389.340	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan					100%		
3	30	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang/bulan		57 orang/bulan	57 orang/bulan	57 orang/bulan	5.716.031.240	5.716.031.240	5.729.221.240	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor	ASN dispendag Kota Blitar	57 orang/bulan	6.287.634.364	

																		sekunde r dan pariwisat a pemuliha n ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19				
3	30	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD	12 laporan		12 laporan	12 lapora n	12 lapora n	5.358.10 0	5.358.10 0	5.358.10 0	Kota Blitar semua kecamat an semua keluraha n	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemuliha n ekonomi kerakyat anmelalu i peningka tan nilai tambah sektor sekunde r dan pariwisat a pemuliha n ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperind ag Kota Blitar	12 lapora n	5.908. 560	
3	30	01	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	100%		100%	100%	100%	156.841. 920	176.239. 220	167.689. 220	Kota Blitar semua kecamat an semua keluraha n					100%		
3	30	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	4 paket		4 paket	4 paket	4 paket	56.492.7 00	76.950.0 00	68.400.0 00	Kota Blitar semua kecamat an semua keluraha n	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemuliha n ekonomi kerakyat anmelalu i peningka tan nilai tambah sektor sekunde r dan pariwisat a pemuliha n ketahan ekonomi sebagai akibat	ASN disperind ag Kota Blitar	4 paket	95.32 5.500	

																		dampak covid-19						
3	30	01	2.0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350 orang		350 orang	350 orang	350 orang		100.349.220	99.289.220	99.289.220	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihannya ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	350 orang		121.579.000	
3	30	01	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	100%		100%	100%	100%		426.443.100	471.778.600	470.338.600	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan					100%			
3	30	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		1 paket	1 paket	1 paket		20.197.000	20.197.000	20.197.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihannya ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	1 paket		25.415.000	

3	30	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 kantor		4 kantor	4 kantor	4 kantor		74.308.000	74.308.000	74.308.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	4 kantor		84.544.000	
3	30	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket		1 paket	1 paket	1 paket		7.577.600	7.577.600	7.577.600	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	1 paket		8.644.000	
3	30	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket		15 paket	15 paket	15 paket		73.987.000	73.987.000	73.987.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi	ASN disperindag Kota Blitar	15 paket		84.040.000	

																		sebagai akibat dampak covid-19					
3	30	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket		4 paket	4 paket	4 paket	45.350.000	45.350.000	45.350.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihannya ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN dispendag Kota Blitar	4 paket		55.720.000	
3	30	01	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	36 dokumen		36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	6.840.000	6.840.000	5.400.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihannya ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN dispendag Kota Blitar	36 dokumen		7.400.000	
3	30	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 laporan		15 laporan	15 laporan	15 laporan	243.533.500	243.519.000	243.519.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan	ASN dispendag Kota Blitar	15 laporan		283.800.000	

																		pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19				
3	30	01	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	100%		100%	100%	100%	440.182. 929	440.657. 529	440.657. 529	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan					100%		
3	30	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan		24 laporan	24 laporan	24 laporan	205.864. 929	205.864. 929	205.864. 929	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	24 laporan	220.4 05.00 0	
3	30	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan		24 laporan	24 laporan	24 laporan	234.318. 000	234.792. 600	234.792. 600	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	24 laporan	263.0 50.00 0	

3	30	01	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMN yang terpelihara sesuai standar	100%		100%	100%	100%	296.829.456	280.888.456	280.888.456	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan				100%			
3	30	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit		17 unit	17 unit	17 unit	195.829.456	180.379.456	189.311.094	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyat anmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunde r dan pariwisata a pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperind ag Kota Blitar	17 unit	206.151.800	
3	30	01	2.0	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit		10 unit	10 unit	10 unit	26.000.000	25.509.000	25.509.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyat anmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunde r dan pariwisata a pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperind ag Kota Blitar	10 unit	36.195.700	
3	30	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 unit		1 unit	1 unit	1 unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyat anmelalui peningkatan nilai tambah sektor	ASN disperind ag Kota Blitar	1 unit	125.000.000	

																		sekunde r dan pariwisat a pemuliha n ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19				
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	72%		72%	72%	72%	4.546.30 8.800	5.549.44 9.600	6.974.09 9.800						72%		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	persentase bangunan pasar rakyat dalam kondisi baik	80%		80%	80%	80%	3.740.56 6.000	4.776.74 6.400	6.204.59 6.600						80%		
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit		2 unit	2 unit	2 unit	227.245. 000	1.263.42 5.400	2.727.76 5.800	Kota Blitar semua kecamatan semua keluraha n	Dana Insentif Daerah, Pendapata n Bagi Hasil		pemuliha n ekonomi kerakyat anmelalu i peningka tan nilai tambah sektor sekunde r dan pariwisat a pemuliha n ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		2 unit	2.256. 000.0 00	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi	11 unit		11 unit	11 unit	11 unit	3.513.32 1.000	3.513.32 1.000	3.476.83 0.800	Kota Blitar semua kecamatan semua keluraha n	Pendapata n Bagi Hasil, Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		pemuliha n ekonomi kerakyat anmelalu i peningka tan nilai tambah sektor sekunde r dan pariwisat a pemuliha n		11 unit	3.635. 716.6 04	

																	ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19					
3	30	03	2.01		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	6%		6%	6%	6%	805.742.800	772.703.200	769.503.200					6%			
3	30	03	2.01	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	527.298.500	494.258.900	491.058.900	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyat anmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata a pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		5 dokumen	950.260.000	
3	30	03	2.01	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	278.444.300	278.444.300	278.444.300	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyat anmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata a pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		4 dokumen	380.000.000	

3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100%		100%	100%	100%	194.267.400	194.267.400	197.267.400					100%		
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase ketersediaan barang penting yang diawasi	100%		100%	100%	100%	92.438.600	92.438.600	92.438.600					100%		
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	92.438.600	92.438.600	92.438.600	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihannya ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	2 Laporan	112.48.749	
3	30	04	2.01		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	100%		100%	100%	100%	77.728.800	77.728.800	77.728.800					100%		
3	30	04	2.01	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam	4 laporan		4 laporan	4 laporan	4 laporan	77.728.800	77.728.800	77.728.800	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan	4 laporan	98.738.000	

						1 (Satu) Kabupaten/Kota												pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19				
3	30	04	2.01		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	100%		100%	100%	100%	24.100.000	24.100.000	24.100.000						100%		
3	30	04	2.01	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 laporan		2 laporan	2 laporan	2 laporan	24.100.000	24.100.000	24.100.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		2 laporan	42.200.000	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN	persentase alat UTTP bertanda terasa	45%		45%	45%	45%	189.149.938	182.109.938	173.160.400						45%		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda terasa	5800 unit		5800 unit	5800 unit	5800 unit	189.149.938	182.109.938	173.160.400						5800 unit		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditara Ulang	5500 unit		5500 unit	5500 unit	5500 unit	86.467.038	86.467.038	77.517.500	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan		5500 unit	89.000.000	

																		pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19				
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	160 orang		160 orang	160 orang	160 orang	102.682.900	95.642.900	95.642.900	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		160 orang	135.820.000	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase peningkatan IKM	3,50%		3,50%	3,50%	3,50%	2.820.071.493	2.820.071.493	3.120.071.493						3,50%		
3	31	02	2.00		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	persentase IKM yang memperoleh pembinaan	5%		5%	5%	5%	2.824.728.793	2.820.071.493	3.120.071.493						5%		
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran	3 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	115.252.175	115.252.175	115.252.175	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan		3 dokumen	218.652.000	

						dan Perwilayahan Industri												pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19				
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	2.571.78 5.048	2.567.32 7.748	2.867.32 7.748	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		5 dokumen	3.654. 500.000	
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	137.691. 570	137.691. 570	137.691. 570	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		3 dokumen	157.200.000	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
2. Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah periode berikutnya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan

Kota Blitar, Agustus 2024



Drs. HAKIM SISWORO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690908 198809 1 001